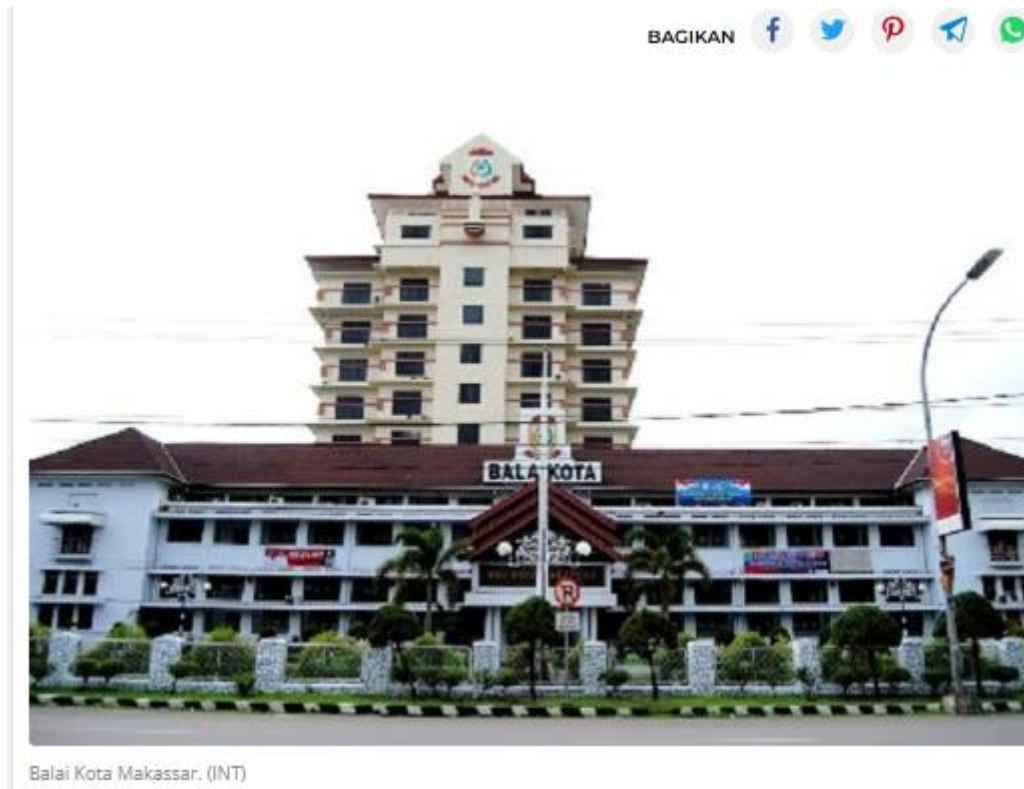


Belanja Modal- Revitalisasi Gedung Tower Balaikota Makassar Tahap II Ditarget Selesai Empat Bulan



Sumber gambar:

<https://sulsel.fajar.co.id/2024/09/12/revitalisasi-gedung-tower-balaikota-makassar-tahap-ii-ditarget-selesai-empat-bulan/>

Pemkot Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar melanjutkan revitalisasi Gedung Tower Balaikota Makassar.

Kontrak pengerjaan Gedung Tower tahap dua ini dimulai sejak 14 Agustus hingga 27 Desember 2024 mendatang. Ialah PT Dwi Gemilang Cipta Mandiri sebagai pemenang kontak. Nilai kontrak Rp19,2 Miliar.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Revitalisasi Tower Balai Kota, Sariana menyampaikan, sudah tiga pekan dilakukan pembongkaran.

Pembongkarannya cukup lama karena harus menunggu OPD untuk mengosongkan ruangnya. Kali ini, pengerjaannya fokus ke Mekanikal Elektrikal dan Plumbing (MEP).

Adapun yang akan dikerjakan yakni lantai satu, tiga, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dan rooftop.

“Interior yang dinding ruang kerja, sekitar lift, kamar mandi dikerjakan semua,” kata Sariana, Kamis, (12/9/2024).

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bangunan Pemerintah Dinas PU Makassar, Hajar Aswad menyatakan, sumber utama harus dibenahi terlebih dahulu, seperti instalasi-instalasi listrik, air kotor, dan air bersih serta pemadam.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

“Dulu kan air bersih dan air hydrant itu menyatu ki. Sekarang terpisah. Persyaratan sekarang harus pisah jadi saya pisah air bersih sendiri sama pemadam,” tuturnya.

Rencananya, pengerjaan Gedung Tower Balaikota ini akan kembali dianggarkan dalam APBD 2025 mendatang. **(selfi/fajar)**

Adapun dalam hal tersebut, Jembatan penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

Proyek pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada APBD 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

1. <https://sulsesel.fajar.co.id/2024/09/12/revitalisasi-gedung-tower-balaikota-makassar-tahap-ii-ditarget-selesai-empat-bulan/>
2. <https://sulsesel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.